

# SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
TERHADAP INVESTOR DALAM PENGGUNAAN KLAUSUL  
EKSONERASI/EKSEMSI PADASAAT PEMBUKAAN REKENING  
EFEK DI PT. MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) SEKURITAS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh :

**BRIYAN DWI RAHMAT**

1910111037

**Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H., M.H**

**Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara. Perlindungan hukum di berikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk dalam pasar modal, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK mengeluarkan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) salah satunya adalah POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan penerbitan POJK ini merupakan bentuk usaha dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor pada sektor jasa keuangan, akan tetapi fakta bahwa *das sollen* yang sering sekali berbeda dengan *das sein* sehingga peran negara melalui lembaga negara yang ada sangat penting untuk memastikan peraturan yang telah di buat dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat kepada investor di perusahaan sekuritas? 2. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi/eksemsi pada perjanjian antara PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas cabang Padang dengan investor sebagai konsumen dalam pasar modal?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian OJK Sumatera Barat tidak mengawasi secara langsung kantor cabang perusahaan sekuritas di daerah, melainkan melakukan pengawasan dengan memeriksa sampling perusahaan sekuritas yang ada berdasarkan jumlah transaksi dan potensi risiko operasional yang ada, OJK Sumatera Barat juga memberikan perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan sosialisasi, literasi dan edukasi serta menerima pengaduan melalui <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/> dan perlindungan hukum secara represif dapat di berikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dari hasil penelitian juga di temukan bahwa perjanjian antara PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang dengan nasabahnya belum sesuai dengan ketentuan dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berkaitan dengan pencatuman klausula baku dalam perjanjian antara PUJK dengan konsumen.

**kata kunci** : **Perlindungan Hukum, Investor, PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang, Otoritas Jasa Keuangan.**